

IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI AKADEMIK SIAKAD DI STKIP PGRI BANGKALAN

Agoeng Koerniawan SA
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan
Arif Darmawan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Joko Widodo
Arif Darmawan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of academic information systems in improving the quality of higher education implementation in PGRI STKIP Bangkalan, and the extent to which the policies of implementing higher education before and after the use of information systems and how satisfaction is felt by students towards academic information systems at STKIP PGRI Bangkalan, named STKIP PGRI Bangkalan's Siakad.

The study was conducted by conducting a survey of users of the internet-based academic information system (Siakad STKIP PGRI Bangkalan), namely lecturers, students and employees with the method of observation and conducting in-depth interviews to obtain as much information as possible from all respondents/informants. The number of informants was 5 people consisting of the chairman of STKIP PGRI Bangkalan, Vice Chairman I, Head of BAAK and two students who had experience in their respective fields of work, knew deeply and had many roles in the process of using information systems.

Based on the results of the study, it was shown that with the use of the information system/ STKIP PGRI Bangkalan's Siakad which is one of the facilities for the smooth activities of the teaching and learning process, it proved to provide convenience, many benefits and benefits that greatly support the duties of serving lecturers, students and outsiders requiring. This is evidenced by the support of the support of lecturers and students, capacity, namely the ability of employees to process data and value, namely the benefits felt by lecturers, employees and students as well as outside parties in need.

Kata Kunci : *Sistem Informasi, Peran Siakad, Pengguna*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan publik, seperti layaknya perusahaan-perusahaan jasa masyarakat pada umumnya. Persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat membuat perguruan tinggi harus selalu menjaga kualitas pelayanan bagi para *stakeholder* (para orang tua mahasiswa, dunia usaha, mahasiswa, calon mahasiswa dan alumni) terutama dalam perolehan informasi terkait agar tetap menjadi pilihan utama di masyarakat. Pengelolaan secara profesional akan dapat memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian dari proses proses tersebut. Saat ini, banyak perguruan tinggi yang telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan proses peningkatan mutu pelayanan, namun proses tersebut masih belum terintegrasi, ada juga yang masih dilakukan secara manual. Sedangkan informasi yang diinginkan oleh *stakeholder* dapat menghasilkan informasi yang lebih bernilai guna, bersifat transparansi dan akuntabilitas terjamin.

Seperti halnya sebuah perusahaan, sebuah institusi pendidikan yang gagal memuaskan pelanggannya akan menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi dikarenakan dampak *bad word-of mouth* dari stakeholdernya (baik dari pengguna lulusan maupun lulusan itu sendiri).

Mahasiswa yang merasa harapannya terpenuhi akan merasa puas dan memiliki persepsi yang positif terhadap kualitas jasa pendidikan yang telah diberikan oleh pihak perguruan tinggi sehingga akan melahirkan kepercayaan (*trust*). Kepercayaan atau *trust* mahasiswa

terhadap institusi perguruan tinggi juga berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terhadap layanan yang diberikan. Pada saat mahasiswa mempercayai institusi tersebut, mahasiswa akan menggantungkan dirinya pada institusi tersebut dan memiliki komitmen dalam hubungan tersebut.

Sebagai salah satu langkah untuk memenuhi harapan mahasiswa dan *stakeholder* untuk bersaing dengan perguruan tinggi swasta lainnya maka ketua STKIP PGRI Bangkalan mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulunya masalah nilai, KRS, jadwal kuliah, pembagian kelas dan lain sebagainya dikerjakan secara manual. Pada pelaksanaannya dilapangan ternyata pekerjaan yang dilakukan secara manual banyak titik kelemahannya. Nilai yang sudah diolah oleh dosen diterima oleh staf prodi, dan dari prodi diterima oleh BAAK, terkadang nilai yang ada di prodi tidak sama dengan nilai yang ada di BAAK sehingga mahasiswa sering komplek pada saat menerima KHS dari BAAK, selain itu berkas nilai yang dikumpulkan oleh dosen ke prodi bertumpuk-tumpuk dilemari. Dari latar belakang tersebut dirumuskanlah permasalahan bagaimana implementasi program sistem informasi akademik SIAKAD di STKIP PGRI Bangkalan?

METODOLOGI

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Nawawi (1993 : 63) mengatakan bahwa metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian, dalam hal ini Peran sistem informasi akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP PGRI Bangkalan. Dengan metode ini peneliti tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta yang ada. (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 4-5).

Peneliti memilih informan, yaitu karyawan baik dosen, staf administrasi dan mahasiswa maupun pejabat struktural yang memiliki pengalaman di bidang tugasnya masing-masing, mengetahui secara mendalam dan banyak berperan dalam menunjang proses penggunaan sistem informasi. Menurut Webster's New Collegiate Dictionary, yang dimaksud informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan mengulang-ulang kata, frasa dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi. Bekerja dengan informan dimulai dari ketidaktahuan (Spradley.1997:35). Menurut Moleong, 1989: 141-142, instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara/*interview guide*. Sebagaimana disebutkan, tujuan kualitatif bersifat mendiskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, oleh sebab itu instrumen diperlukan karena peneliti dituntut dapat menemukan data yang diangkat dari fenomena atau peristiwa tertentu, peneliti dalam melaksanakan walaupun wawancara sifatnya tak terstruktur tetapi minimal peneliti menggunakan *ancer-anser* pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, yang juga disebut sebagai pedoman wawancara *interview guide* (Suharsimi, 1998: 137).

Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian (Bungin, 2001: 123).

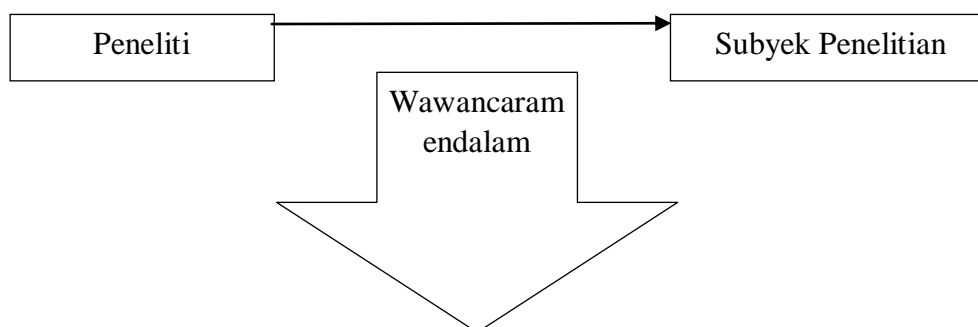
Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan *indepth interview*. Menurut Ritzer (1992: 74), observasi biasanya digunakan terutama untuk mengamati tingkah laku yang aktual. Dalam hal ini tipe observasi yang dipergunakan adalah tipe '*participant as observer*' yaitu memberitahukan maksud peneliti kepada kelompok yang diteliti. Wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan

kepada sejumlah informan sivitas akademika STKIP PGRI Bangkalan. Wawancara mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1977: 129). Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang subyek penelitian serta pendirian-pendirian mereka yang merupakan pembantu utama metode observasi (Koentjaraningrat, 1977: 162).

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain catatan, buku, hubungannya dengan penelitian tersebut.

Gambar Metode Pengumpulan Data



Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur/terbuka. Menurut Mulyana (2002: 181) wawancara tak berstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Ada 3 (tiga) karakteristik wawancara tak berstruktur/terbuka yaitu :

1. memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik mendefinisikan pendapatnya.
2. Mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetapi pertanyaan yang sesuai untuk semua responden/informan
3. Memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (denzin dalam Mulyana, 2002:182)

Teknik Analisis Data

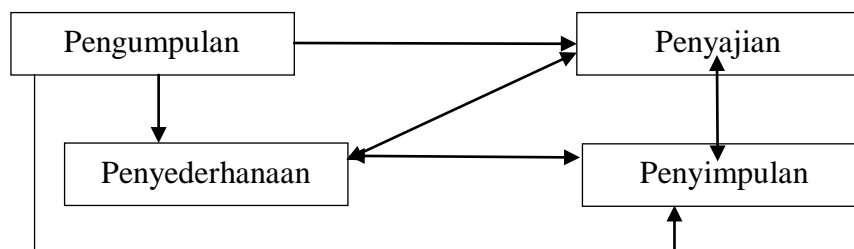
Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapatdiceriterakan kepada orang lain.

Gambar Model Strategi Analisis Deskriptif Kualitatif



Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles dan Huberman, 1992: 15-20). Dalam menganalisis data yang telah diperoleh yaitu, mengklasifikasikan atau menggolongkan hasil data / wawancara sesuai dengan masalahnya atau berdasar pada jawaban dari responden kemudian, data atau jawaban dari responden tersebut dianalisis dan diinterpretasikan serta berupaya mencari jalan pemecahan atau ditarik suatu kesimpulan. Proses analisis data digambarkan sebagai berikut:

Gambar Komponen Analisis Data



TEORI

Tahap-Tahap Kebijakan Publik; Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

- a) Tahap Penyusunan Agenda, Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan, Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap Adopsi Kebijakan, Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d) Tahap Implementasi Kebijakan, Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- e) Tahap Evaluasi Kebijakan Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Evaluasi kebijakan menurut Samudro, dkk (Riant Nugroho, 2006:156) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi, evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Menurut Limberry (Leo Agustino, 2006: 183) analisis evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat pelaksanaan suatu kebijakan dan membahas hubungan antara cara-cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisasi suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Dalam Indiahono (2009: 59) untuk mengevaluasi kebijakan publik, ada terdapat tiga elemen kebijakan yang dapat diamati. Masing masing elemen tersebut adalah :

- a. Support, Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh Ketua STKIP untuk benar – benar menerapkan suatu konsep kebijakan. Elemen support terdiri komitmen politik (political will) para pemegang kebijakan, berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung, serta proses sosialisasi dalam pelebagaan suatu kebijakan ke masyarakat.
- b. Capacity, adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari aktor kebijakan untuk mengambil suatu langkah dalam memecahkan persoalan kemudian mengimplementasikannya. Ada beberapa hal yang paling harus dimiliki sehubungan dengan elemen ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial (anggaran). Sumber daya manusia penting mengingat kapasitas dari para perumus kebijakan akan diuji ketika proses memformulasikan dan menerapkan/menjalankan kebijakan publik. Anggaran dibutuhkan untuk mendukung kinerja para aktor kebijakan dalam semua kegiatannya mulai dari formulasi sampai implementasi.
- c. Value, berbagai kebijakan tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang diuntungkan dengan adanya implementasi kebijakan tersebut. Untuk itu maka pengambil kebijakan harus benar – benar teliti dalam memilih prioritas alternatif-alternatif kebijakan agar benar – benar memberikan value yang secara signifikan dirasakan oleh publik.

PEMBAHASAN

Support, dukungan dari berbagai pihak merupakan bagian dari elemen support suatu kebijakan publik (Indiahono, 2009: 60). Pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk mengambil suatu kebijakan. Tujuan utama sistem informasi adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh semua penggunanya, baik internal maupun eksternal.

Elemen support terdiri dari beberapa unsur yang diteliti oleh penulis dalam mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen (Siakad STKIP PGRI Bangkalan). Unsur yang diteliti adalah memudahkan bagi mahasiswa dalam mengakses data Siakad

dimanapun mereka berada asalkan tersambung dengan internet, dan karyawan sebagai tenaga administrasi merasa terbantu dengan adanya Siakad STKIP PGRI Bangkalan.

”Positifnya, memudahkan, dimana setiap saat kita bisa tahu mahasiswa angkatan berapa, misalnya angkatan 2000 harusnya mahasiswa yang KRS jumlahnya ada 100% setelah dicek ternyata yang melakukan KRS baru 50%nya sedangkan kapasitas kelasnya sudah habis, jadi kita bisa tahu apa yang perlu ditambahkan dan dikurangi. Itu dari segi pengutamaan mahasiswa di ruang perkuliahan. Selain itu memudahkan memantau pembayaran SPP karena sebelum KRS harus sudah membayar SPP dan lain-lainnya. Kemudian nilai apa yang menjadi prasyarat yang mestinya keluar tidak usah repot-repot mencari satu-satu, jadi untuk kesulitan mahasiswa yang menjadi masalah besar bisa kita ketahui lebih dulu. Permasalahannya disini, karena kalo ada mahasiswa komplan kok saya gak bisa mengambil KRS padahal ternyata dia kena prasyarat ternyata nilainya belum ada” (Informan 3).

”Nah isi dari Siakad STKIP PGRI Bangkalan ini adalah akademik, keuangan, SDM sampai pencarian perpustakaan. Terus mengenai akademik, Alhamdulillah kita sendiri sudah lengkap, memang untuk pengisian database ini dua semester baru selesai, untuk apapun kita bisalah. Untuk pencarian data mahasiswa, pribadi mahasiswa sampai prestasi mahasiswa didalam kelas ada grant nya dan pula untuk jadwal dosen, evaluasi dosen sampai pengisian-pengisian KRS, untuk melihat pengumuman hasil nilai, apalagi saat ini kita sudah melengkapinya dengan *Hot Spot*, jadi lewat *Handphone* mahasiswa dimanapun berada bisa melihat nilai. KRS online itu dimanapun mereka berada tidak harus ke Bangkalan asal kelengkapan administrasinya sudah dipenuhi” (Informan 1).

Selain untuk pengisian KRS yang dapat dilakukan di rumah atau lewat internet, fasilitas yang ada di Siakad STKIP PGRI sangat lengkap sehingga sangat memudahkan baik bagi dosen, mahasiswa dan karyawan. Seperti yang dikatakan oleh beberapa responden mengenai manfaat, kemudahan-kemudahan yang dirasakan ataupun keuntungan Siakad STKIP PGRI.

”Semenjak diadakan sistem ini mulai semester genap 2015, banyak sekali kemudahan-kemudahan berkaitan dengan mahasiswa lebih-lebih untuk mahasiswa aktif bisa melakukan berbagai macam aplikasi dimana dia berada dengan menggunakan internet. Yang berkaitan dengan ini Siakad STKIP PGRI Bangkalan ada beberapa sub yang dibagi, dapat dilihat soal pembayaran, nilai, pengajuan KRS pada waktu yang ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik”(informan 2).

“Dengan adanya Siakad STKIP PGRI Bangkalan yang jelas kita terbantu ya, kalau ada teman-teman yang dari luar daerah mengaksesnya bisa dari internet, secara umum teman-teman yang dari luar daerah/Bangkalan aksesnya tidak terkumpul di kampus saja tapi bisa di internet”(Informan 4).

Sebagian besar informan mendukung adanya Siakad STKIP PGRI Bangkalan terbukti dengan ungkapan kata-kata hasil wawancara diatas, para informan merasakan kemudahan-kemudahan setelah adanya Siakad STKIP PGRI Bangkalan, bahwa dengan menggunakan Siakad STKIP PGRI Bangkalan banyak kemudahannya dan tidak perlu datang di kampus tetapi dapat dilakukan dirumah ataupun dimana saja melalui internet.

Capacity, kemampuan pengambil kebijakan patut menjadi sorotan didalam evaluasi kebijakan. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai (Indiahono, 2009: 60). Unsur kemampuan atau keberdayaan dari aktor kebijakan untuk mengambil suatu langkah dalam memecahkan persoalan kemudian mengimplementasikannya. Ada beberapa hal yang paling harus dimiliki sehubungan dengan elemen ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya financial (anggaran).

”Yang namanya ada sesuatu yang baru mesti ada min plusnya. Bagi personil-personil yang sudah terbiasa dengan sistem lama kadang-kadang agak kesulitan untuk mengikuti, tapi

kalau yang sudah merasakan cari data itu cepat ya ada baiknya. Namun secara keseluruhan banyak manfaat positifnya” (Informan 2).

Informan 2 adalah pembantu ketua I Bidang Akademik pada perguruan tinggi STKIP PGRI Bangkalan yang pada tahun 2014 baru saja dirotasi menjadi PK I, setahun kemudian perguruan tinggi STKIP PGRI Bangkalan menggunakan Siakad. Sebagai pembantu ketua I Bidang Akademik tentu saja beliau mempunyai peranan penting dalam penggunaan Siakad karena setiap harinya bergelut dalam urusan akademik sehingga mengetahui tentang Siakad, dengan segala keuntungan maupun kerugiannya. Menurut beliau Sistem informasi yang dijalankan di perguruan tinggi STKIP PGRI Bangkalan merupakan integrasi dari seluruh bagian yang ada di Lembaga STKIP PGRI Bangkalan, hal tersebut merupakan nilai positif karena selalu *up to date* dan langsung dapat dimanfaatkan oleh semua Prodi dan sub bagian lain. Contohnya peminjaman buku di perpustakaan dapat dijadikan prasyarat KRS, pengisian KRS bisa secara online dan bisa mengisi dirumah tidak perlu datang ke Bangkalan. Hal tersebut tidak dapat dilakukan sebelum ada Siakad karena sebelum ada Sim data antara prodi dan sub bagian selalu berbeda dan tidak *up to date*.

”Nah isi dari Siakad STKIP PGRI Bangkalan ini adalah akademik, keuangan, SDM sampai pencarian perpustakaan. Terus mengenai akademik, Alhamdulillah kita sendiri sudah lengkap, memang untuk pengisian database ini dua semester baru selesai, untuk apapun kita bisalah. Untuk pencarian data mahasiswa, pribadi mahasiswa sampai prestasi mahasiswa didalam kelas ada grant nya dan pula untuk jadwal dosen, evaluasi dosen sampai pengisian-pengisian KRS, untuk melihat pengumuman hasil nilai, apalagi saat ini kita sudah melengkapinya dengan *Hot Spot*, jadi lewat *Handphone* mahasiswa dimanapun berada bisa melihat nilai. KRS online itu dimanapun mereka berada tidak harus ke Bangkalan asal kelengkapan administrasinya sudah dipenuhi” (Informan 1).

Menurut informan 1 bahwa kiat-kiat Perguruan Tinggi STKIP PGRI Bangkalan mendirikan Sistem Informasi karena mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan jumlahnya cukup banyak karena terdiri dari lima prodi, sehingga data harus disusun secara sistematis agar tidak memakan tenaga dan waktu yang banyak. Hal ini merupakan kesadaran dan kebijakan ketua STKIP PGRI yaitu bapak Dr. H. Sunarjo, SH., M.Hum yang dibantu oleh pembantu ketua I dan pembantu ketua II sepakat membentuk suatu 'Sistem Informasi Manajemen'.

”Siakad STKIP PGRI Bangkalan sudah berlangsung 2 semester, jadi sebetulnya masih harus ada pembenahan. Kalau pelaksanaannya sendiri secara teknis menguntungkan. Mahasiswa tidak perlu antri jauh-jauh ataupun ke warnet karena dapat dilakukan di rumah, jadi bisa langsung akses ngisi KRS. Namun yang jadi permasalahan disini di dalam menangani pengisian KRS melalui Siakad STKIP PGRI Bangkalan ini jika terjadi benturan, artinya sekprodi/pengelola disini harus standby selama pengisian KRS karena banyak mahasiswa yang selalu komplain terutama masalah keterbatasan kapasitas. Mereka berupaya masuk di kelas itu padahal kelasnya sudah tutup karena sudah maksimal” (Informan 3).

Selaku Ka.BAAK Informan 3 beliau sudah barang tentu banyak terjun langsung melakukan aktifitas akademik sehingga dapat mengetahui persis kegunaan Siakad STKIP PGRI Bangkalan khususnya penggunaan Siakad di prodi-prodi. Menurut Informan 3 bahwa tujuan dibentuknya Siakad STKIP PGRI Bangkalan untuk meningkatkan informasi akademik bukan hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk dosen sangat penting, karena dengan begitu dosen bisa tahu persis terutama mengenai jadwal mengajar kemudian juga dapat memperoleh informasi lebih jauh mengenai mahasiswa. Sejauh ini untuk dosen selain itu penting juga terutama untuk komunikasi dengan mahasiswa secara langsung yaitu dengan mengeluarkan *Hot Messages* untuk memberikan pengumuman, karena kalau pengumuman yang ditempel bisa jadi tidak banyak yang tahu atau yang membacanya. Lebih jauh dikatakan oleh mahasiswa bahwa dengan adanya Siakad STKIP PGRI Bangkalan sekarang ini bagus sekali dan sangat membantu karena dari pihak BAAK mengingatkan apabila ada dosen yang

tidak pernah mengajar sehingga BAAK dapat memberikan laporan terhadap Kaprodi untuk melakukan teguran kepada dosen hal tersebut merupakan salah satu keuntungan dari Siakad STKIP PGRI Bangkalan.

Value, berbagai kebijakan tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang diuntungkan dengan adanya implementasi kebijakan tersebut. Untuk itu maka pengambil kebijakan harus benar – benar teliti dalam memilih prioritas alternatif-alternatif kebijakan agar benar – benar memberikan value yang secara signifikan dirasakan oleh publik.

”.....keuntungannya bahwa kita dibantu mulai dari vloting mata kuliah, jadwal itu hari dan jam lebih pasti, kemudian pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa karena mahasiswa mengisi langsung ke Siakad STKIP PGRI Bangkalan, kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa langsung memilih kelas A atau kelas yang lainnya, lalu kita juga bisa ngeset kalau harus ada kelas dua ruang itu satu mata kuliah dua ruang maksud saya itu jumlah antar ruangnya bisa relatif sama karena satu ruangan penuh, mahasiswa diharapkan berpindah ke ruang yang lain dan kita bisa tahu sebetulnya mana dosen favorit dan tidak dari situ, karena dengan ruang yang satu penuh itu berarti kan animo mahasiswa terhadap dosen yang mampu di ruangan itu tinggi. Lha biasanya dosen yang kurang favorit jumlahnya sedikit pesertanya, yang lain biasanya penuh ini beberapa keuntungannya” (Informan 5).

Kelebihan lainnya dari Siakad STKIP PGRI Bangkalan menurut informan 5, bahwa dalam Siakad STKIP PGRI Bangkalan ada seperti pesan yang disampaikan untuk dosen, disitu mahasiswa dapat menyampaikannya langsung pesan untuk dosen mungkin mengenai pelajarannya bagaimana dan lain-lain. Selama ini informan 5 mengemukakan bahwa dalam Siakad STKIP PGRI Bangkalan sudah ada filternya karena selama lima semester kuliah informan 5 merasakan belum pernah mengalami ruang kuliah yang bentrok, jadi waktu mengisi KRS kalau mata kuliahnya bentrok tidak bisa ngeklik atau di input. Sedangkan mengenai menu-menu di Siakad STKIP PGRI Bangkalan yang sering di akses informan 5 selain KRS, adalah mengenai daftar hadir, presentase kemudian SMS dan melihat IP.

”Semenjak diadakan sistem ini mulai semester genap 2003, banyak sekali kemudahan-kemudahan berkaitan dengan mahasiswa lebih-lebih untuk mahasiswa aktif bisa melakukan berbagai macam aplikasi dimana dia berada dengan menggunakan internet” (Informan 4).

Informan 4 adalah seorang mahasiswi angkatan 2012 program Studi PPKn yang akan menyelesaikan skripsinya, menurutnya mengenai penggunaan Siakad STKIP PGRI Bangkalan bagus karena sudah tidak manual lagi. Dengan Siakad STKIP PGRI Bangkalan mahasiswa dapat mengisi KRS *online* tanpa harus ke kampus tetapi dapat dilakukan dirumah karena memang sudah dapat dari internet langsung. Dikatakan oleh informan 4 fasilitas dari Siakad STKIP PGRI Bangkalan antara lain KRS *online*, dapat mengetahui nilai, jadwal, dosen, ruang, mata kuliahnya apa jam berapa di mana ruangnya dan dosennya siapa, terus kalau mahasiswa mau tahu dosen ada di kampus jam berapa, tentang kegiatan dosen ada juga, pesan mahasiswa.

Dengan melihat ungkapan-ungkapan yang telah disampaikan beberapa responden mengenai keuntungan, kemudahan dan segi positif yang dimiliki Siakad STKIP PGRI Bangkalan, jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Davis dan Olson dalam Leidner (1994), sistem informasi sebagai suatu sistem yang tersusun atas elemen mesin-orang yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung fungsi-fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, telah terbukti karena semua itu harus ada kesadaran, komitmen dan kebersamaan antara baik itu pimpinan, karyawan maupun dosen maupun mahasiswa yang bersama-sama menyadari pentingnya sistem. Hal itu merupakan konsekuensi, komitmen bersepakat bersama, sehingga dengan satu komitmen tersebut maka persoalan-persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama dengan musyawarah dan mufakat untuk kesulitan-kesulitan itu dipikul bersama.

KESIMPULAN

Dengan berjalannya sistem informasi di perguruan tinggi STKIP PGRI Bangkalan yang dikenal dengan Siakad STKIP PGRI Bangkalan banyak membantu proses belajar mengajar, tidak hanya bagi karyawan yang menjalankan administrasi akademiknya tapi juga bermanfaat baik bagi dosen maupun mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Mangkunegoro, (2000), *Manajemen Sumberdaya Manusia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Alex S, Nitisemito, (1982), *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, (2003). *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bodnar, G.H & Hopwood, William S, 1995, *Accounting Information Systems*, Prentice Hall International, 6th Ed.
- Cronin, J J dan Steven A. Taylor, (1994), "SERVPERF Versus SERVQUAL : Reconciling Performance-Based and Perceptions Minus Expectations Measurement of Service Quality", *Journal of Marketing* Vol. 58, January 125-131.
- Davis K. & Newstorn, J.W., (1995). *Human Behavior at Work, Organizational Behavior*, Mc Graw Hill, Singapore.
- Dessler, G, (1997), *Hukum Resource Management*, Prenhallindo Jakarta.
- Flippo B Edwin, (1987), *Personal Management*, Mc Graw Hill, New York.
- Flippo, B Edwin, (1993), *Manajemen Personalia (terjemahan)*, Edisi keenam, Erlangga, Jakarta.
- Gaspersz, Vincent M. St, CIQA, CPIM, (1997), *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*, Penerjemah Sampara Lukman (1999), GM Indonesia, Jakarta.
- Gaspersz, Vincent M. St, CIQA, CPIM, (1997), *Membangun Tujuh Kebiasaan Kualitas Dalam Praktek Bisnis Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gibson, H.L, (1977), *Determining User Involvement*, *Journal of System Management*, August, 20-21.
- Gibson L James, (1987), *Perilaku Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Husein, Muhammad Fakhri dan Wibowo, Amin, (2002), *Sistem Informasi Manajemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta .
- Keen, P.G.W, (1981), *Information System and Organization Change*, *Communication the ACM*, vol 14 (1) January, 24-33.
- Lau, Elfreda Aplonia, (2004), *Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kepuasan dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Lima Variabel Moderating*, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.7, No.1 Januari, hal 23-43.
- Lucas, H.C, Jr, (1974), *Systems Quality, User Reaction, and the Use of Information System*, *Management Informatics*, vol 3 (4), 207-212.
- Luthans F, (1995), *Organisasi Behavior*, th, ed. Mc. Graw Hill, Singapore.
- Mathreu J.E, Tannenbaum S.I, Salas E, (1992), *Influences of Individual and Situational Characteristics on Measures of Training Effectiveness*, *Academy of Management Journal*, 35, 828-847.
- STKIP PGRI Bangkalan, (2015), *Buku Pedoman Perguruan Tinggi STKIP PGRI Bangkalan*
- Thoha Miftah, (1994), *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, (1997), *Prinsip prinsip Total Quality Service*, Andi Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy dan Diana Anastasia, 2000, *Total Quality Management*, Andi Offset, Yogyakarta.

- Wahyusumidjo, (1994), *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia ,Jakarta.
- Warella Y, (1997), *Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , (2004), *Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi*, Makalah dalam rangka Seminar Quality Assurance Undip 22-23 September, Semarang.
- Winarno, Wing Wahyu, (2004), *Sistem Informasi Manajemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.